

JURNAL PROSIDING
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS DHARMAWANGSA

**Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi, Terhadap Pengelolaan
Keuangan Berkonsep Value for Money pada Pemerintah di Kabupaten
Dairi**

Farhan Zihni, Wahyu Permana

Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Dharmawangsa

farhanzihni5@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh akuntabilitas, dan transparansi, terhadap kinerja pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money pada pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini dilaksanakan pada instansi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset pemerintah di Kabupaten Dairi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang bersifat eksplanatif yaitu untuk melihat pengaruh beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Data penelitian ini diperoleh dari kuesioner dan observasi langsung. Hasil penelitian dengan menggunakan analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, memberikan pengaruh yang positif terhadap pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money.

Kata Kunci : Akuntabilitas, Transparansi, Value for Money

Abstract

The objective of the research was to analyze the influence of accountability and transparency on financial management performance by using the concept of Value for Money in Dairi District Administration. This research was conducted in the Financial Management and Government Assets Agency of Dairi District Administration. It used quantitative explanatory method in which the research could be done when the researcher had the knowledge of its problems which meant that some theories and empirical studies had tested various hypotheses so that there would be empirical generalization. The data were gathered by using questionnaires and direct observation and analyzed by using multiple linear

regression analysis. The result of the research showed that there was positive influence of accountability and transparency on financial management, using the concept of Value for Money.

Keywords : *Accountability, Transparency, Value for Money.*

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik masih termasuk baru dalam bidang akuntansi di Indonesia, namun dalam waktu yang singkat telah mengalami perkembangan yang pesat. Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktek akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik non- pemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat agar anggaran dikelola secara akuntabel dan transparan (Mardiasmo,2002:7).

Disamping undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada dasarnya semua peraturan tersebut menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan laporan keuangan.

Akuntabilitas dan transparansi tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan keuangan daerah. Pentingnya akuntabilitas dan transparansi ini terlihat pada Kepres No. 7 Tahun 1999 di mana pemerintah mewajibkan setiap instansi pusat maupun daerah sampai eselon II untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Sehubungan pentingnya keterbukaan informasi tentang kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah, diterbitkan juga Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik (UU-KIP) tentang transparansi kegiatan dan aktivitas Pemerintah Daerah.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat di pertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Prinsip Akuntabilitas adalah setiap pelaksanaan tugas, penggunaan sumber- sumber, serta penggunaan wewenang harus atau diperiksa baik oleh pihak yang berkepentingan maupun melalui lembaga independen. Sedangkan prinsip transparansi berarti semua penyelenggaraan pemerintah harus terbuka kepada masyarakat umum, baik dalam pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan maupun dalam berkaitan dengan suatu keputusan perlu memiliki akses untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran yang baik adalah akuntabilitas dan transparansi yang merupakan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance).

Pemerintah harus dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melakukan reformasi dalam penyajian laporan keuangan, yakni pemerintah harus mampu menyediakan semua informasi keuangan relevan secara jujur dan terbuka kepada publik, karena kegiatan pemerintah adalah dalam rangka melaksanakan amanah rakyat. Kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan penerimaan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat luas). Aspek penting yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan keuangan daerah adalah aspek legalitas penerimaan dan pengeluaran daerah, serta pengelolaan (stewardship) keuangan daerah secara baik, perlindungan aset fisik dan financial, mencegah terjadinya pemborosan dan salah urus. Berdasarkan pandangan diatas, baik pemerintah pusat maupun daerah merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam upaya penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat, dengan misi penting adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat. Tercapainya anggaran yang baik tidak terlepas dari pengawasan dalam penyusunan maupun penggunaan anggaran. Sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran dana dan institusi yang selalu merugi. Terutama dalam menggunakan belanja, khususnya belanja langsung sering terjadi penggunaan anggaran yang tidak sesuai sehingga tujuan tidak tercapai secara ekonomis, efisien dan efektif yang manfaat atau output dari pelayanan publik sulit dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip Value for Money dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip Value for Money diyakini dapat memperbaiki pengelolaan anggaran sektor publik. Value for Money merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Value for Money dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo,2002:7). Fenomena yang diamati dalam pengelolaan anggaran saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi sektor publik seperti unit- unit kerja pemerintah, baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkap segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, di mana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu diakses, oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat

dimengerti dan dipantau. Akuntabilitas pengelolaan anggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Dairi, masih Akuntabilitas secara vertikal (vertical accountability) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, pertanggung jawaban unit-unit kerja kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dan pemerintah pusat kepada DPR/MPR. Akuntabilitas secara horizontal (horizontal accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas, masih pada tahap pertanggungjawaban kepada DPRD yang menjadi wakil masyarakat di legislatif.

Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan Value for Money karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros). Anggaran Kabupaten Dairi pada 5 tahun terakhir dari tahun 2013 (Rp.761.358.442.282), tahun 2014 (Rp.800.253.894.566), tahun 2015 (Rp.991.290.049.428), tahun 2016 (Rp.1.082.309.817.111), dan tahun 2017 (Rp.1.149.194.986.485). Belanja tidak Langsung tahun 2013 (Rp.469.416.634.602) sebesar 62%, tahun 2014 (Rp.460.230.876.752) sebesar 58%, tahun 2015 (Rp.604.386.385.711) sebesar 61%, tahun 2016 (Rp.643.028.880.590) sebesar 59%, dan tahun 2017 (Rp.670.352.945.964) sebesar 58%. Belanja Langsung tahun 2013 (Rp.291.941.807.680) sebesar 38%, tahun 2014 (Rp.340.023.017.814) sebesar 42%, tahun 2015 (Rp.386.903.663.717) sebesar 39%, tahun 2016 (Rp.439.280.936.521) sebesar 41% dan tahun 2017 (Rp.478.842.040.521) sebesar 42% (sumber : APBD Kabupaten Dairi tahun 2013 sampai dengan tahun 2017) . Belanja belanja langsung merupakan gambaran dan komitmen pemerintah daerah terhadap pembangunan masyarakat, sehingga menjadi sorotan tajam terhadap belanja langsung daerah yang masih 50%. Porsi belanja langsung yang ideal adalah 70% dan belanja tidak langsungnya 30%. Bahkan apabila lebih besar dari itu jauh lebih baik. Tapi kadang istilah ini akan menjadi tidak tepat kalau melihat dokumen anggaran belanja daerah, karena banyak nomenklatur anggaran yang tidak tepat. Sudut pandangnya murni akuntansi bukan psikologi atau sosiologi pembangunan. Tuntutan baru agar Pemerintah Kabupaten Dairi ini meningkatkan pelayanan melalui perwujudan Value for Money dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. Pemerintah seharusnya bisa memperbaiki sejumlah hal yang menjadi penyebab bahwa pelaksanaan pengelolaan anggaran yang tidak berdasar pada Value for Money. Value for Money harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah karena dalam konteks otonomi daerah, Value for Money merupakan jembatan untuk mengantar Pemerintah Daerah mencapai good governance yaitu Pemerintah daerah yang transparan, akuntabel, ekonomis, efektif, dan efisien. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan pada pemerintah Kabupaten Dairi. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan Siregar pada tahun 2011. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu

penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dairi, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Kota Pematang Siantar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada penelitian ini tidak menggunakan indikator variabel pengawasan dan objek penelitian yang berbeda.

METODE PENELITIAN

Dalam rangka mendapat data dalam penyusunan tesis ini, maka penulis tertarik mengambil judul tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kabupaten Dairi dan melakukan penelitian ini di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja Nomor 127 Sidikalang . Jenis penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian eksplanatif yaitu untuk melihat pengaruh beberapa variabel yang belum pasti. Penelitian Eksplanatif atau yang bersifat menerangkan, yaitu penelitian yang dapat dilakukan kalau pengetahuan tentang masalahnya sudah cukup, artinya sudah ada beberapa teori tertentu dan sudah ada berbagai penelitian empiris yang menguji berbagai hipotesa tertentu sehingga terkumpul berbagai generalisasi empiris. Penelitian yang bisa berbentuk eksperimen selalu bertolak dari suatu hipotesa yang diperoleh dari suatu teori tertentu Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen terhadap Pengelolaan Keuangan berkonsep Value For Money sebagai variabel dependen. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2011). Observasi nonpartisipan adalah teknik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulam data juga dilakukan melalui pengumpulan jurnal ke perpustakaan dan mempelajari APBD Kabupaten Dairi.

Jenis data yang digunakan dalam tesis ini adalah: Data Primer adalah data yang diperoleh secara dari hasil penelitian lapangan (Field Research) pada instansi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dairi; Data Sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, yaitu mengutip atau mencatat dari dokumen- dokumen yang berupa data, dari pemerintah kabupaten. Observasi nonpartisipana adalah tehnik pengumpulan data melalui pengamatan terhadap dokumen dan beberapa literatur yang terkait dengan penelitian. Pengumpulan data juga dilakukan melalui riset keperpustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan yang dapat mendukung penelitian ini. Menurut Jadongan Sijabat mengemukakan: “Populasi mencakup keseluruhan orang, kejadian, atau hal minat yang ingin diinvestigasi”. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini dirancang studi kasus, maka objek penelitian hanya pada satu pemerintahan daerah saja. Adapun pemerintahan yang dipilih adalah pemerintah yang menerapkan

pengelolaan keuangan yang baik. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Dairi dan populasi berjumlah 37 orang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Variabel (x1) adalah akuntabilitas; dan Variabel (x2) adalah transparansi; Pengukuran variabel ini menggunakan instrumen yang telah dikembangkan sebelumnya yaitu tesis Sektor Publik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi dan Pengawasan terhadap Pengelolaan APBD Berkonsep Value for Money sebagai variabel moderating yang dilaksanakan di Kota Pematang Siantar. Instrumen pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 point dengan meminta responden menunjukkan pilihan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dari setiap pernyataan yang diajukan. Instrumen pernyataan terdiri dari 9 item pernyataan untuk prinsip akuntabilitas, 9 item pernyataan untuk prinsip transparansi dan 11 item pernyataan pengelolaan keuangan berkonsep value for money. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money yang merupakan inti pengelolaan keuangan pada organisasi pemerintah. Pengukuran untuk variabel pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money menggunakan instrumen pernyataan. Instrumen pernyataan diukur dengan menggunakan skala Likert 5 point dengan meminta responden menunjukkan pilihan sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju dari setiap pernyataan yang diajukan. Instrumen pernyataan terdiri dari 11 item pernyataan untuk prinsip Konsep Value for Money.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money

Hasil statistik deskriptif jawaban dari responden atas variabel konsep Value for Money pada tabel 4.5 memperlihatkan rata-rata pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money sebesar 46,27 dengan standar deviasi 5,470. Statistik Deskriptif Variabel Pengelolaan Keuangan Berkonsep Value for Money, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 20 responden (54%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 17 responden (46%). Anggaran merupakan komponen penting dalam sebuah perusahaan. Anggaran dikatakan sebagai komponen penting, karena anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan pengendalian. Anggaran yang disusun secara jujur adalah harapan semua orang. Tetapi pelaksanaan untuk penyusunan anggaran tersebut dilapangan banyak menyimpang. Atas pernyataan Tahapan pengelolaan anggaran melibatkan unsur-unsur masyarakat, memperlihatkan mayoritas responden memilih netral berjumlah 29 responden (78%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 8 responden (22%). Keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan anggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi masyarakat maupun pemerintah. Karena keterlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program dan memberikan kesempatan menyuarakan apa kebutuhan mereka. Jawaban dari responden atas pernyataan Proses dan pertanggungjawaban anggaran

harus diawasi secara terus menerus, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 18 responden (49%).

Dalam aspek perencanaan, penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan dan akan lebih efektif jika diawasi oleh lembaga pegawai khusus (oversight body). Jawaban dari responden atas pernyataan Pemberian pelayanan publik, cepat, responsif dan murah biaya, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%) dan responden yang memilih netral berjumlah 18 responden (49%). Fenomena perkembangan sektor publik dapat diamati dengan makin menguatnya tuntunan pelaksanaan akuntabilitas publik. Tuntunan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan dengan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu: akuntabilitas vertikal (vertical accountability), dan akuntabilitas horizontal (horizontal accountability). Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada seluruh masyarakat, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 30 responden (81%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 7 responden (19%). Peningkatan pengelolaan keuangan dalam pelayanan publik agar menghasilkan layanan informasi yang berkualitas, sehingga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik. Hal ini juga dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik (good governance) yaitu transparan, efektif, dan efisien serta akuntabel. Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran merupakan dokumentasi rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 26 responden (70%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 11 responden (30%). Anggaran merupakan pernyataan yang hendak dicapai selama periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Anggaran merupakan dokumentasi rahasia, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang tidak berkepentingan. Jawaban dari responden atas pernyataan Dalam mengevaluasi anggaran, hanya membandingkan target dengan realisasi/sesungguhnya, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (59%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 18 responden (41%). Pada perencanaan anggaran belanja harus harus di rencanakan sesuai dengan kebutuhan instansi, setelah itu harus diusahakan sesuai dengan realisasinya karena apabila terjadi selisih akan terlihat pada saat evaluasi. Lemahnya perencanaan anggaran pada akhirnya akan memunculkan underfinancing atau overfinancing yang semuanya mempengaruhi tingkat efisiensi dan efektivitas unit kerja pemerintah. Jawaban dari responden atas pernyataan Indikator hasil kinerja yang akan dicapai dan telah digunakan untuk mengevaluasi anggaran, memperlihatkan mayoritas

responden memilih setuju berjumlah 29 responden (78%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 8 responden (22%). Evaluasi adalah penilaian terhadap anggaran yang telah disusun dan mengetahui seberapa besar penyimpangan yang telah terjadi dapat ditelusuri sampai kepada para pelaksana anggaran yang bertanggung jawab. Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran dipertanggungjawabkan kepada otoritas lebih tinggi (vertical) dan kepada masyarakat luas horizontal), memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 19 responden (59%) dan responden yang memilih netral berjumlah 18 responden (41%). Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas pengelolaan keuangan yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Jawaban dari responden atas pernyataan Pengumuman anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 19 responden (59%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 18 responden (41%). Pemerintah yang accountable memiliki ciri-ciri mampu menyajikan informasi secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat karena itu adalah prinsip dari transparansi. Jawaban dari responden atas pernyataan Informasi yang diberikan kepada publik dapat meningkatkan transparansi, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 19 responden (59%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 18 responden (41%). Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik untuk meningkatkan transparansi. Jawaban dari responden atas pernyataan Mudah untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 25 responden (68%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 12 responden (32%). Adanya sarana publik untuk menilai pengelolaan keuangan dari pemerintah. Karena itu adalah salah satu pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat. Jawaban dari responden atas pernyataan Sulit untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran karena birokratis, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 23 responden (62%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 14 responden (38%). Informasi mengenai dokumen publik sulit diakses karena dianggap penting oleh pemerintah. Tidak tersedianya informasi mengenai dokumen anggaran menjadi bukti ketidakseriusan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik sebagai agenda kebijakan yang penting. Jawaban dari responden atas pernyataan Laporan pertanggungjawaban tahunan anggaran selalu tepat waktu, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 20 responden (54%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 17 responden (46%). Laporan pertanggungjawaban menyediakan informasi yang menyangkut pengelolaan keuangan dan bermanfaat besar terhadap evaluasi pelaksanaan. Jawaban dari responden atas pernyataan Transparansi anggaran dapat mengakomodasi usulan/suara rakyat,

memperlihatkan mayoritas responden memilih netral berjumlah 26 responden (70%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 11 responden (30%). Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Jawaban dari responden atas pernyataan Musrenbang dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 24 responden (65%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 13 responden (35%). Pemerintah telah menetapkan kegiatan musyawarah pembangunan daerah atau Musrenbang sebagai sarana untuk melibatkan masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah. Jawaban dari responden atas pernyataan Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 24 responden (65%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 13 responden (35%). Pengumuman tentang anggaran bisa didapat setiap waktu adalah prinsip dari transparansi. Tetapi yang ada sekarang, pemerintah jarang mengakses di media maupun diportal pemerintah daerah mengenai anggaran. Jawaban dari responden atas pernyataan nomor 1, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 27 responden (73%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 10 responden (27%). Kebijakan anggaran di Kabupaten Dairi hanya dapat diakses oleh orang-orang yang berkepentingan. Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran dikelola dengan memanfaatkan uang sebaik mungkin dengan konsep value for money yang berorientasi kepada kepentingan publik, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 18 responden (49%). Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Jawaban dari responden atas pernyataan nomor 2, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 25 responden (68%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 12 responden (32%). value for money merupakan sebuah konsep dalam pengelolaan keuangan. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran dikelola secara efisien dengan penggunaan terendah untuk mencapai tujuan tertentu, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 16 responden (43%), memilih netral 14 responden (38%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 7 responden (19%). Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran dikelola secara efektif dimana semua program yang ditargetkan dapat mencapai hasil yang telah ditetapkan, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 19 responden (51%) dan responden yang

memilih sangat setuju berjumlah 18 responden (49%). value for money merupakan sebuah konsep dalam pengukuran pengelolaan keuangan. Value for money yaitu indikator yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi masyarakatnya. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi, efisien, dan efektif. Jawaban dari responden atas pernyataan Anggaran dikelola secara merata (equility) dan penggunaan dana publik tidak hanya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 22 responden (59%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 15 responden (41%). Kesetaraan (equality) berkaitan dengan pendistribusian uang publik secara merata Jawaban dari responden atas pernyataan Adanya peran pemerintah daerah untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan, memperlihatkan mayoritas responden memilih sangat setuju berjumlah 19 responden (51%) dan responden yang memilih setuju berjumlah 18 responden (49%). Jawaban dari responden atas pernyataan Alokasi belanja anggaran lebih berorientasi pada kepentingan publik, memperlihatkan mayoritas responden memilih setuju berjumlah 22 responden (51%) dan responden yang memilih sangat setuju berjumlah 15 responden (49%). Implementasi konsep value for money pada organisasi sektor publik perlu gencar dilakukan seiring dengan meningkatnya tuntutan akuntabilitas publik dan pelaksanaan good governance. Implementasi konsep tersebut diyakini dapat memperbaiki akuntabilitas sektor publik dan memperbaiki pengelolaan keuangan sektor publik dengan meningkatkan efektivitas layanan publik, meningkatkan mutu layanan publik, menurunkan biaya layanan publik karena hilangnya inefisiensi, dan meningkatkan kesadaran akan penggunaan uang publik (public costs awareness)

2. Uji Kualitas Data Uji Validitas

Validitas adalah tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang digunakan. Instrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Dengan demikian, instrumen yang valid merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas menggunakan program SPSS dengan metode Person Correlation, yaitu mengkorelasikan tiap item dengan skor total item kuisioner. Dasar pengambilan keputusan uji validitas sebagai berikut: (Alhusin, 2003:341) Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid. Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ atau r_{hitung} negatif, maka item pertanyaan dinyatakan tidak valid. Nilai r_{tabel} dapat dilihat pada tabel statistik r dengan $df = n-2$ atau $37-2=35$ dan dengan signifikansi 0,05 maka didapat nilai $r_{tabel} = 0,325$. Dapat diketahui semua item nilai korelasi lebih dari $r_{tabel} 0,325$. Dengan ini maka dapat disimpulkan bahwa item-item kuisioner tersebut valid.

3. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Pengujian reliabilitas yang digunakan adalah dengan menggunakan metode Cronbach Alpha. Metode Cronbach Alpha digunakan untuk mencari reliabilitas instrumen yang skornya merupakan rentangan dari beberapa nilai atau berbentuk skala. Menurut Sekaran (2003) dalam Priyatno (2013:30), pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sbb: Cronbach's alpha $< 0,60$ = reliabilitas buruk Cronbach's alpha $0,60 - 0,79$ = reliabilitas diterima Cronbach's alpha $0,8$ atau di atasnya = reliabilitas baik Setelah dihitung dengan bantuan program SPSS maka dapat diketahui nilai reliabilitas (Cronbach's alpha) adalah bahwa nilai Cronbach alpha untuk ke tiga variabel di atas $0,600$. Karena nilai tersebut lebih besar dari $0,600$ maka alat ukur kuisisioner reliabel atau telah memenuhi syarat reliabilitas.

4. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik ini bertujuan untuk menguji kelayakan atas model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Pengujian ini juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan tidak terdapat multikolinieritas dan heteroskedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal.

5. Uji Normalitas

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Residual adalah nilai selisih antara variabel Y sesungguhnya dengan variabel Y yang diprediksikan. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P Plot of regression standardized sebagai dasar pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan mengikuti garis diagonal maka model regresi tersebut telah normal dan layak dipakai untuk memprediksi variabel bebas. (Ghozali, 2016:156).

KESIMPULAN

Akuntabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money pada Pemerintah Kabupaten Dairi. Hal ini ditunjukkan oleh uji t yang didapat nilai thitung $>$ ttabel ($2,281 > 2,032$), sehingga H_0 ditolak. Nilai t hitung positif, artinya berpengaruh positif yaitu semakin meningkat akuntabilitas maka akan meningkatkan pengelolaan keuangan. Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap

pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money. Akuntabilitas salah satu unsur pokok perwujudan Good Corporate Governance yang telah dilaksanakan sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah telah bekerja dengan ekonomis, efisiensi dan efektif. Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan berkonsep Value for Money, dimana anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Transparansi secara parsial berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan berkonsep Value for Money pada Pemerintah Kabupaten Dairi.

DAFTAR PUSTAKA

- Addina, M. (2010). Penelitian Kinerja Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan.
- Adhim, M. (2008). Penelitian Analisis Anggaran Pemerintah dan Kaitannya dengan Perekonomian Daerah di Kabupaten Sarolangun.
- Alhusin, S. (2003). "Aplikasi Statistik Praktis dengan Menggunakan SPSS 10 for Windows", Edisi Kedua, Yogyakarta: Graha Ilmu. Hal: 69, 257, 341.
- Bahtiar, A. & Muchlis, I. (2008). Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Salemba Empat
- Asikin, F.D. (2014). Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Kinerja. Makassar.
- Priyatno, D. (2014). Pengolahan Data Terpraktis Edisi Terbaru. Yogyakarta : Andi.
- Ghazali, I, 2016, "Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23", Cetakan kedelapan, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal 5, 103, 134, 138, 156, 157.
- Haryanto, dkk. (2007). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Pertama. Semarang : Penerbit UNDIP
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Ketiga. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Mulya, R.A. Pengaruh Akuntabilitaas, Transparansi dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money di Kabupaten Bone.
- Nordiawan & Hertianti. (2010). Akuntansi Sektor Publik, Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat
- Tri, N.S. (2007). Analisis Penerapan Konsep Value For Money Pada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yogyakarta : Akmenika
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual.
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pieris & Jim. (2008). *Etika Bisnis & Good Corporate Governance*, Edisi Kedua. Jakarta: Pelangi Cendikia
- Priyatno, D. (2013), "Mandiri Belajar Analisis Data Dengan SPSS", Yogyakarta: Media Kom. Hal 9, 30, 40.
- Priyatno, D. (2014). "SPSS 22 Pengolah Data Terpraktis", Edisi 1, Yogyakarta: ANDI. Hal: 94, 103, 106.
- Rahayu, S. (2009). *Penelitian Mengukur Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Muaro Jambi*.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*, Edisi Kedua. Jakarta : Mitra Kencana